

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Implementasi *Green Sukuk* dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Sejak penerbitan pertama kali di tahun 2018, Indonesia mencatatkan diri sebagai negara pelopor penerbitan sukuk ramah lingkungan secara global. Perkembangan bursa obligasi hijau menunjukkan pertumbuhan dengan pesat. Awalnya, penerbitan *green* sukuk diterbitkan menggunakan dollar setiap tahunnya dengan jangka waktu dan imbal hasil tetap. Selanjutnya, otoritas di Indonesia juga sukses meluncurkan sukuk ramah lingkungan dalam mata uang rupiah di wilayah Indonesia. Sejak tahun 2014, rezim Indonesia menginisiasi langkah pelabelan anggaran (*budget tagging*) yang lalu diikuti dengan pembuatan Panduan Obligasi Hijau dan Sukuk Hijau Indonesia. Keuntungan yang diberikan bersifat fluktuatif dengan batas keuntungan terendah (*floating with floor*) yang mengacu pada Suku Bunga Acuan Bank Indonesia 7 Hari *Reverse Repo*. Besaran keuntungan ini diubah setiap triwulan pada tanggal penyesuaian keuntungan hingga masa akhir pembayaran. Adapun berikut merupakan rincian dari penerbitan *domestic green* sukuk.

Tabel 4. 1
Penerbitan Green Sukuk Tahun 2019-2022

Green Sukuk	ST006	ST007	ST008	ST009
Penerbitan	November 2019	November 2020	November 2021	November 2022
Jumlah	Rp1,4 Triliun	Rp5,4 Triliun	Rp5 Triliun	Rp10 Triliun
Imbal Hasil (floating with floor)	6,75%	5,5%	4,8%	6,15%

Sumber: Kemenkeu

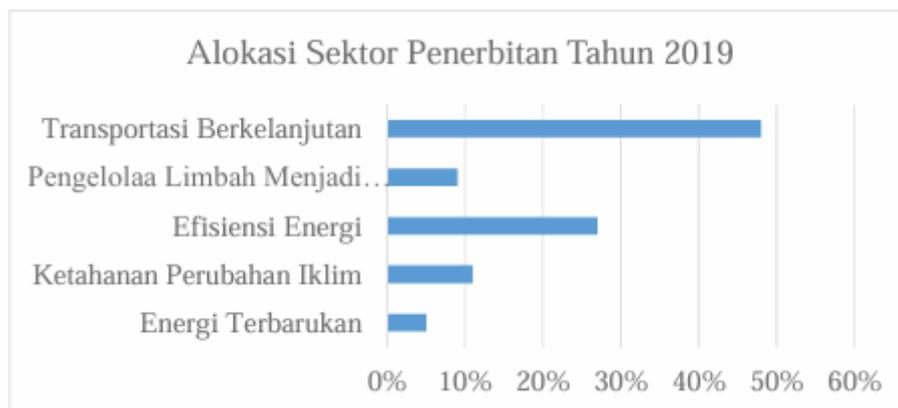
Di bulan November tahun 2019, Indonesia meluncurkan *green* sukuk ritel pertama melalui sukuk tabungan seri ST006, dengan total omset meraih Rp1,46 triliun dan melibatkan 7.735 investor. Di tahun 2020, rezim sukses menarik 16.6992 penanam modal serta memperoleh pendapatan sejumlah Rp5,42 triliun dari seri ST007. Pada tahun 2021, seri ST008 berhasil menghimpul 14.337 investor, menjadikannya penerbitan dengan jumlah pemilik modal terbesar kedua dalam kategori SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Selanjutnya, pada tahun 2022 ditetapkan hasil penjualan *green* sukuk tabungan seri ST009 dengan total volume pemesanan sebesar Rp 10 triliun dengan jumlah investor yang berpartisipasi dalam pembelian seri ini mencapai 35.397 investor.

Green sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan semata, tetapi juga sebagai katalis penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi berkelanjutan atau sebagai motor penggerak dalam menciptakan

fondasi ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berorientas pada keberlanjutan. Melalui pendanaan proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, rehabilitasi lahan kritis, dan program mitigasi perubahan iklim, *green* sukuk memiliki dampak nyata dalam mendukung transformasi struktural ekonomi Indonesia menuju model yang lebih ramah lingkungan dan rendah karbon. Proyek-proyek yang didanai melalui *green* sukuk berkontribusi langsung dalam pencapaian target nasional, seperti minimalisasi pelepasan gas rumah kaca, peningkatan efektivitas energi, serta konservasi potensi alam. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengorbankan ekosistem dan generasi mendatang. Penerbitan *green* sukuk secara konsisten oleh pemerintah dari tahun ke tahun menandakan adanya keseriusan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam kebijakan fiskal dan pembangunan nasional.

1. Alokasi dan Dampak Tahun 2020 (ST006)

Gambar 4. 1
Grafik Alokasi Sektor Penerbitan 2019



Sumber: Kemenkeu (2020)

Berdasarkan gambar lima bidang-bidang yang didanai oleh penanaman modal sukuk ramah lingkungan di tahun 2019 yang diinformasikan di tahun 2020, sektor transportasi berkelanjutan mendominasi dengan porsi sekitar 48%. Dominasi ini sejalan dengan kondisi pada tahun 2018, di mana transportasi berkelanjutan juga menjadi sektor utama yang dibiayai. Proyek transportasi berkelanjutan mencakup konstruksi serta perawatan jalur kereta api beserta infrastruktur penunjangnya di seluruh daerah Indonesia.

Bidang kedua yang paling berpengaruh adalah efisiensi energi dengan porsi sekitar 27%. Proyek dalam sektor ini meliputi perbaikan dan pembaruan fasilitas umum, seperti peningkatan infrastruktur bandara dan penggantian lampu jalan dengan lampu tenaga surya yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Selanjutnya, bidang daya tahan menghadapi perubahan cuaca berkontribusi sejumlah 11%,

diikuti oleh sektor konversi sampah menjadi daya dengan porsi yang sama, yaitu 11%. Sementara itu, bidang daya energi terbarukan menyumbang kurang lebih 5%, dengan proyek seperti pengembangan prasarana pencahayaan pada wilayah dengan keterbatasan cahaya, contohnya Papua, memanfaatkan daya matahari.

Tabel 4. 2
Proyek dan Alokasi Dana Penerbitan 2019

Sektor	Jenis Proyek	Lokasi	Alokasi Dana (dalam rupiah)
Energi Terbarukan	Pembangkit dan transmisi energi dari sumber energi terbarukan.	Papua, Papua Barat, Papua Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Riau, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,	717.681.714.395
Transportasi Berkelanjutan	Mengembangkan sistem transportasi bersih.	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jalur Jawa Utara, Jabodetabek.	5.991.185.034.377

Pengelolaan Limbah Menjadi Energi	Meningkatkan pengelola limbah.	Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu.	1.208.151.340.776
Ketahanan terhadap Perubahan Iklim untuk Wilayah dan Sektor yang Sangat Rentan/Pengurangan Risiko Bencana.	Mitigasi banjir.	Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali.	1.577.697.956.601
Efisiensi Energi	Peningkatan efisiensi energi infrastruktur	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat,	3.311.831.934.944

		Nusa Tenggara Timur, Papua, Bengkulu, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Kepulauan Riau, Papua Barat.	
--	--	--	--

Sumber: Kemenkeu (2020)

Merujuk pada tabel tersebut, adapun pengaruh dari peluncuran *green* sukuk bisa dijelaskan:

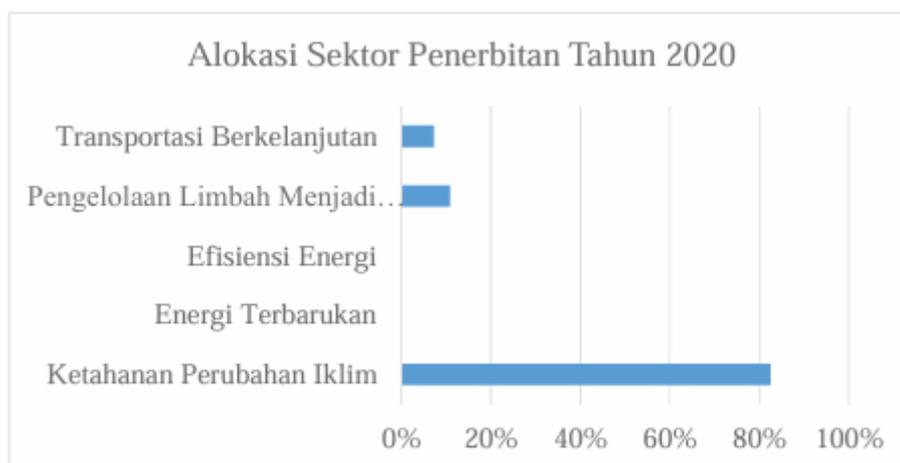
- 1) Sebesar 3.218.014,41 ton emisi CO₂e bemereda, menempuh hari depan rendah karbon.
- 2) Pembangunan rel kereta sepanjang 691,4 kilometer.
- 3) Kapasitas pembangkit listrik tambahan 7.429 kWh.
- 4) Sebanyak 2.056.200 orang rumah tangga yang mendapat manfaat dari pengelolaan sampah yang lebih baik.

Berdasarkan data yang diperoleh, penerbitan *green* sukuk secara signifikan berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, khususnya guna menunjang terwujudnya Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Green* sukuk berperan dalam mendukung SDG 7 (Daya Ramah Lingkungan serta Ekonomis), SDG 8 (Lapangan Kerja yang Baik serta Kemajuan Perekonomian), SDG 9 (Perindustrian, Pembaharuan, serta Prasarana), SDG 11 (Wilayah Urban serta Permukiman yang Lestari), serta SDG 13 (Penanganan

Perubahan Cuaca). Kondisi tersebut memperlihatkan *Green Sukuk* ialah bagian dari instrumen keuangan inovatif yang mampu mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

2. Alokasi dan Dampak Tahun 2021

Gambar 4. 2
Grafik Alokasi Sektor Penerbitan 2020



Sumber: Kemenkeu (2021)

Berdasarkan data di atas dari laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, sektor yang dibiaya oleh *green sukuk* tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan *green sukuk* dialokasikan untuk proyek baru atau pembiayaan (financing). Pada tahun 2020, sektor ketahanan terhadap perubahan iklim mendominasi dengan proporsi 49,51%, diikuti oleh proyek refinancing atau kelanjutan proyek dari tahun sebelumnya sebesar 33,02%. Program daya tahan menghadapi perubahan cuaca berfokus pada pengembangan serta pembenahan prasarana penanggulangan musibah, contohnya

pembangunan kawasan penyerapan air, waduk, pengairan, serta fasilitas penahan malapetaka, contohnya lahar dan kejadian darurat lain. Sementara itu, proyek refinancing meliputi bidang pengolahan sampah sejumlah 10,77% dan bidang pergerakan ramah lingkungan, misalnya transportasi jalur kereta, sejumlah 7,21%.

Tabel 4. 3
Proyek dan Alokasi Dana Penerbitan 2020

Sektor	Jenis Proyek	Lokasi	Alokasi Dana (dalam rupiah)
Energi Terbarukan	-	-	-
Transportasi Berkelanjutan	Peningkatan jaringan transportasi ke standar desain yang lebih tahan terhadap iklim.	DKI Jakarta (Jalur Komuter Jabodetabek) dan Jawa Tengah (Jalur Ganda Jawa Selatan), Jawa Timur, Banten (Jalur Komuter Jabodetabek), dan Jawa Barat (Jalur Ganda Jawa Selatan).	787.123.657.980
Pengelolaan Limbah Menjadi Energi	Meningkatkan pengelolaan sampah dan rehabilitasi area tempat pembuangan sampah.	Seluruh provinsi kecuali Banten.	1.163.691.459.558

Ketahanan terhadap Perubahan Iklim untuk Wilayah dan Sektor yang Sangat Rentan/Pengurangan Risiko Bencana.	Manajemen kekeringan, mitigasi banjir, ketahanan pangan, manajemen kesehatan masyarakat.	Seluruh provinsi kecuali kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku	8.912.419.748.498
--	--	---	-------------------

Sumber: Kemenkeu (2021)

Merujuk pada uraian tabel yang tersaji, adapun pengaruh penerbitan *green* sukuk bisa dijelaskan:

- 1) Diperkirakan memberikan manfaat bagi 2.059.094 domestik disebabkan oleh adanya optimalisasi pengaturan limbah.
- 2) Daya tahan menghadapi perubahan cuaca bagi wilayah dan bidang yang paling rawan/minimalisasi bahaya alam memenuhi kebutuhan penyediaan air untuk minum seluas 275,5 m³, lindungi 1920,4 Ha wilayah akibat genangan air besar, perbaikan susunan pengairan tersier seluas 134.700 Ha, membangun 1.071 satuan sumber air tambahan yang berguna bagi 1.236.000 penduduk, menciptakan serta memulihkan kembali 12,000 Ha sawah.
- 3) Transportasi yang ramah lingkungan dapat menurunkan emisi karbon sebesar 1.415.718 tCO₂e, mengurangi waktu perjalanan rata-rata sebanyak 30 menit, serta mendorong jumlah pengguna jasa meningkat hingga 1,3 kali lipat (lebih dari 2,5 miliar pengguna beralih dari transportasi milik

sendiri).

Berdasarkan data tersebut Indonesia sangat berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pemerintah telah mengaitkan dan mengintegrasikan target serta indikator SDGs "di dalam kerangka kerja perkembangan lima tahunan negara, yang memastikan pelaksanaan SDGs di negara ini. Seperti yang disebutkan dalam bagian sebelumnya dari laporan ini, hasil dari Green Sukuk telah berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 1 (Menghilangkan kondisi kekurangan di semua tempat), Tujuan 2 (Mengakhiri kelaparan), Tujuan 3 (Memastikan kehidupan yang sehat serta mempromosikan kesejahteraan), Tujuan 5 (Mewujudkan kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan), Tujuan 6 (Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan), Tujuan 7 (Mewujudkan ketersediaan energi yang murah), Tujuan 8 (Mempromosikan pertumbuhan perkonomian yang berkelanjutan dan inklusif), Tujuan 9 (Mengembangkan prasarana yang kuat, mendorong perindustrian yang merata dan ramah lingkungan, serta memajukan pembaharuan), Tujuan 10 (Menekan kesenjangan), Tujuan 11 (Menciptakan wilayah perkotaan dan hunian yang inklusif,), dan Tujuan 12 (Melakukan upaya mendesak untuk menanggulangi perubahan cuaca). Oleh karena itu, Green bukan sekadar instrumen pendanaan yang efektif, melainkan juga akselerator utama dalam mendukung Indonesia mencapai tujuan pembangunan yang

berkesinambungan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan menciptakan dampak positif yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

3. Alokasi dan Dampak Tahun 2022

Gambar 4. 3
Grafik Alokasi Sektor Penerbitan 2021



Sumber: Kemenkeu (2022)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat yakni mayoritas penanaman modal *green* sukuk dialokasikan guna mendanai program di bidang daya tahan menghadapi perubahan cuaca dimana pada sektor ini tersusun atas proyek *financing* sejumlah 27,22% serta *refinancing* 11,35%. Selanjutnya, sektor energi terbarukan mencatat *refinancing* sebesar 21,7% sementara pada proyek *financing* sejumlah 12,24%. Selain itu sektor pengelolaan limbah menjadi daya sejumlah 8,33% serta sektor bangunan hijau menyumbang 1% dan proyek *financing* atau proyek pada tahap awal.

Tabel 4. 4
Proyek dan Alokasi Dana Penerbitan 2021

Sektor	Jenis Proyek	Lokasi	Alokasi Dana (dalam rupiah)
Energi Terbarukan	Pembangkit dan transmisi energi dari sumber energi terbarukan, Pengembangan dan pengelolaan sub sektor transportasi dan lalu lintas laut.	Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Jawa Timur, Maluku, dan DKI Jakarta.	28.659.728.000
Transportasi Berkelanjutan	Infrastruktur konektivitas transportas kereta api, konstruksi dan pengelolaan infrastruktur perkeretaapian dan fasilitas pendukung, keselamatan dan keamanan, serta layanan transportasi kereta api.	Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan.	3.303.460.437.785
Pengelolaan Limbah Menjadi Energi	Peningkatan pengelolaan sampah.	Sumatera Selata, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Riau, North Sumatera.	913.558.418.802
Ketahanan terhadap Perubahan Iklim untuk Wilayah dan Sektor yang Sangat	Manajemen kekeringan, mitigasi banjir, ketahanan pangan, manajemen kesehatan	Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Utara,	4.228.389.950.529

Rentan/Pengurangan Risiko Bencana.	masyarakat.	Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Papua.	
Bangunan Hijau	Pengembangan perumahan dan bangunan	DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Utara	109.589.210.916

Sumber: Kemenkau (2022)

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, adapun dampak penerbitan *green* sukuk dapat dijelaskan:

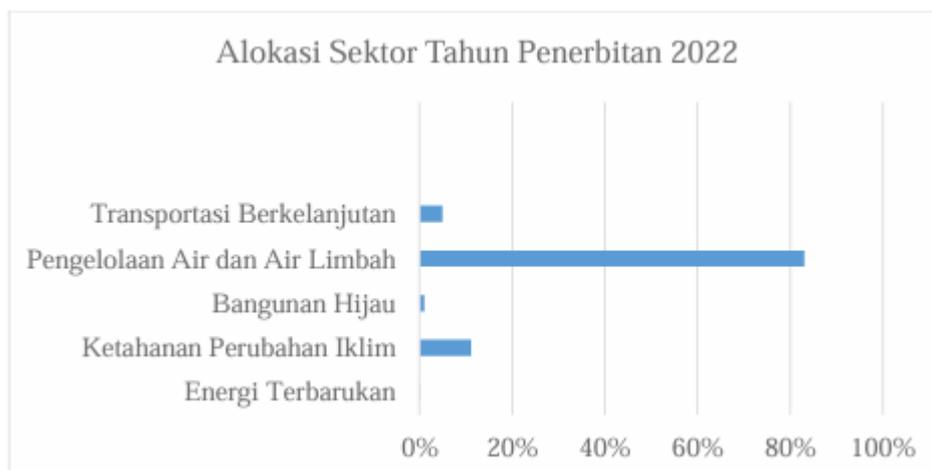
- 1) Energi terbarukan yang dapat mengurangi emisi GRK sebesar 136,86 ton CO_{2e} per tahun dari pemasangan PLTS atap dan sebagian berkontribusi terhadap pengurangan emisi sebesar 4.972 ton CO_{2e} dari pemasangan alat bantu navigasi di laut.
- 2) Transportasi berkelanjutan yang dapat mengurangi emisi CO_{2e} sebesar 197.564,8 ton dari peningkatan infrastruktur kereta api perkotaan Jabodetabek dan fasilitas pendukungnya.
- 3) Pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sebanyak 865.357 rumah tangga yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan sampah kota, dan 75.760 rumah tangga yang mendapatkan manfaat dari sistem

pembuan.

Pemerintah telah mengaitkan dan mengintegrasikan target serta penanda Sasaran Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Kerangka Kerja Perkembangan Lima Tahunan Negara Nasional (RPJMN), yang memastikan implementasi SDGs di seluruh negeri. Pada data yang telah dilampirkan dari laporan ini, hasil dari penerbitan Green Sukuk telah berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi untuk Semua), Tujuan 7 (Energi Terjangkau dan Bersih), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan), Tujuan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), dan Tujuan 13 (Aksi terhadap Perubahan Iklim). Integrasi Green Sukuk ke dalam RPJMN tidak hanya memperkuat komitmen Indonesia terhadap SDGs tetapi juga menjadi katalisator dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan instrumen keuangan hijau ini, Indonesia berada pada arah yang benar untuk menghasilkan pengaruh baik yang berkelanjutan bagi penduduk dan alam sekitar.

4. Alokasi dan Dampak Tahun 2023

Gambar 4. 4
Grafik Alokasi Sektor Penerbitan 2022



Sumber: Kemenkeu (2023)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat ternyata mayoritas investasi *green* sukuk dialokasikan guna mendanai proyek di sektor pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan sejumlah 56,35%. Selanjutnya, sektor ketahanan perubahan iklim mencatat alokasi dana sebesar 20,42% pada *refinancing* sementara pada proyek *financing* sebesar 4,21%. Selain itu sektor transportasi berkelanjutan dengan proyek *financing* sebesar 18,25% sementara pada proyek *refinancing* sebesar 0,26%, pengelolaan limbah 0,15%, pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam 0,03% dan sektor bangunan hijau sebesar 0,15%.

Tabel 4. 5
Proyek dan Alokasi Dana Penerbitan 2022

Sektor	Jenis Proyek	Lokasi	Alokasi Dana (dalam rupiah)
Energi Terbarukan	Pembangkitan dan transmisi energi dari sumber energi terbarukan,	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Utara, Sulawesi Maluku, Papua, Papua Barat.	491.163.200
Transportasi Berkelanjutan	Mengembangkan sistem transportasi bersih, peningkatan jaringan transportasi ke standar desain yang lebih tahan terhadap iklim,	DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara.	5.704.107.501.246
Pengelolaan Limbah Menjadi Energi	Peningkatan pengelolaan sampah.	DI Yogyakarta, Sulawesi Utara.	10.125.192.698.851

Ketahanan terhadap Perubahan Iklim untuk Wilayah dan Sektor yang Sangat Rentan/Pengurangan Risiko Bencana.	Mitigasi banjir, manajemen kekeringan.	Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat.	849.262.551.943
Bangunan Hijau	Pengembangan bangunan hijau sesuai dengan greenship	Papua	64.464.742.471

Sumber: Kemenkeu (2023)

Merujuk pada uraian tabel yang tersaji, adapun faktor penerbitan *green* sukuk bisa dijelaskan:

- 1) Daya terbarukan berperan dalam minimalisasi pelepasan gas GRK tahunan sejumlah 130.316,39 ton CO₂e dari penataan modul surya di permukaan atap dan alat bantu untuk perangkat navigasi laut, menyediakan efisiensi energi, merampingkan navigasi pengiriman, dan meningkatkan keamanan pengiriman.

- 2) Daya tahan menghadapi perubahan cuaca diperkirakan akan memperbesar kemampuan layanan pembuangan struktur air baku dan infrastruktur guna meraih sasaran patokan negara pada 4,10 m³/s dari konstruksi/rehabilitasi 685 unit air baku dan jaringan irigasi air tanah 50 km, menguntungkan daerah rentan terhadap luapan air serta kekurangan air, meminimalisasi kerawanan wilayah kota dan pantai yang rawan terhadap luapan air dari pengembangan serta pemulihan control luapan air sungai sepanjang 233 km dan struktur perlindungan pesisir sepanjang 98 km di provinsi yang dilayani.
- 3) Penataan sumber daya alam tanah secara lestari berperan dalam pengembalian kondisi ekosistem melalui perbaikan hutan dan lahan di provinsi Sulawesi Utara, terutama wilayah ekonomi khusus Likupang.
- 4) Peningkatan pengelolaan limbah padat kota, diproyeksikan menguntungkan total 3,7 juta orang.
- 5) Meningkatkan kapasitas layanan pasokan air untuk 284,628 hektar areal pertanian yang mudah terkena luapan air dan musim kering melalui pengembangan/rehabilitasi 33 unit area pengairan bersama dengan sistem pengairan permukaan air/rawa/pesisir memiliki jarak 1.158 km; menaikkan daya tampung penyimpanan reservoir, penyimpanan air alami dan

buatan sebesar 4.482 juta m³ melalui pengembangan dan rehabilitasi 447 bendungan yang lebih kecil dan lebih besar, 18 danau serta 119 penyimpanan air; meningkatkan kapasitas pemurnian air konsumsi layanan yang habis sejumlah 150 : 1.100 liter perdetik daya tampung pemurnian air buangan melalui konstruksi/pemulihan pabrik daya tampung pemurnian air buangan serta sambungan rumah.

Hasil dari *green* sukuk telah berkontribusi terhadap pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi untuk Semua), SDG 7 (Energi Terjangkau dan Bersih), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), SDG 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), SDG 13 (Aksi terhadap Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem Laut), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). *Green* sukuk telah terbukti menjadi akselerator pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Melalui skema pembiayaan inovatif ini, Indonesia tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur hijau tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan, selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan.

B. Potensi *Green Sukuk* sebagai Akselerator dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

1. Faktor Internal dan Eksternal

a. Kekuatan (*Strengths*)

1) Komitmen Pemerintah terhadap SDGs

Pemerintah Indonesia telah menjadi pionir dalam penerbitan *Green Sukuk* global, dengan menerbitkan *Green Sukuk* pertama pada tahun 2018. Komitmen ini diperkuat melalui kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur ramah lingkungan. Pemerintah juga berperan dalam memastikan setiap proyek yang didanai *Green Sukuk* telah melalui proses verifikasi ketat, sejalan dengan *Green Bond Principles* (GBP) dan Standar Syariah Nasional.

Green sukuk berperan penting dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 3 mengenai kehidupan sehat dan sejahtera, SDG 6 tentang air bersih dan layak, SDG 7 energi bersih dan terjangkau, SDG 11 kota dan komunitas berkelanjutan, SDG 13 penanganan perubahan iklim, dan SDG 14 ekosistem laut, dan SDG 15 ekosistem daratan. Dana yang dihimpun dari *Green Sukuk* diarahkan untuk membiayai proyek-proyek hijau

seperti pembangkit listrik tenaga surya, pengelolaan limbah, serta reforestasi. Dengan demikian, *Green Sukuk* tidak hanya menjadi alat investasi tetapi juga instrumen untuk mempercepat pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

2) Instrumen Keuangan Syariah yang Dapat Diterima Luas

Green Sukuk dirancang mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). Hal ini menjadikannya sebagai instrumen keuangan yang dapat diterima dan menjangkau populasi Muslim besar di Indonesia dan dunia. Penerapan akad syariah seperti ijarah, wakalah, dan murabahah dalam *Green Sukuk* memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga memperkuat kepercayaan dan partisipasi investor syariah.

3) Kepercayaan Investor Global

Green sukuk memiliki daya tarik yang luas karena menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan kepedulian terhadap lingkungan. Instrumen ini berhasil menarik perhatian investor konvensional yang memiliki komitmen terhadap *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Dengan

meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, *green* sukuk menjadi pilihan yang relevan bagi investor institusi, baik yang berorientasi profit maupun yang memiliki misi sosial dan lingkungan.

4) Stabilitas Ekonomi Relatif Tinggi

Stabilitas ekonomi Relatif Tinggi menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung *green* sukuk di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan terhadap tekanan global, termasuk pandemi COVID-19, dengan pertumbuhan PDB yang stabil dan inflasi terkendali. Stabilitas ini meningkatkan kepercayaan investor terhadap risiko investasi yang rendah, sehingga mendukung pembiayaan proyek hijau berbasis SDGs, seperti energi terbarukan dan pembangunan kota berkelanjutan. Selain itu, posisi fiskal yang kuat memungkinkan pemerintah menerapkan kebijakan kondusif dan insentif untuk pengembangan *green* sukuk, memperkuat kredibilitas Indonesia di pasar global sambil mendorong dampak positif jangka panjang terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

1) Kompleksitas Penerbitan

Penerbitan *green* sukuk melibatkan proses yang lebih

rumit dibandingkan dengan sukuk konvensional. Yang mana hal tersebut mencakup proyek yang didanai harus memenuhi standar lingkungan yang ketat dan memperoleh sertifikasi dari lembaga independen (seperti *Climate Bonds Initiative*), dibutuhkan laporan yang memantau dampak proyek terhadap lingkungan di mana hal ini menambah beban administratif.

2) Rendahnya Literasi Keuangan

Rendahnya literasi keuangan menjadi kelemahan yang signifikan dalam pengembangan *green* sukuk di Indonesia. Meskipun minat terhadap investasi berbasis syariah dan berkelanjutan meningkat, pemahaman masyarakat khususnya investor ritel tentang instrument seperti *green* sukuk masih terbatas. Rendahnya literasi ini menghambat partisipasi yang lebih luas dalam pasar keuangan hijau, terutama di kalangan individu individu dan sektor UMKM. Kurangnya pengetahuan tentang manfaat jangka panjang Green Sukuk dan bagaimana instrumen ini mendukung SDGs juga membuat penerimaan pasar domestik belum optimal. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya edukasi publik yang lebih intensif dan kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung ekonomi berkelanjutan.

3) Pasar Sukuk yang Masih Terbatas

Pasar Sukuk yang Masih Terbatas menjadi salah satu kelemahan dalam pengembangan *green* sukuk di Indonesia. Meskipun *green* sukuk telah mendapatkan perhatian di tingkat global, ukuran pasar sukuk domestik masih relatif kecil dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan diversifikasi produk, kurangnya likuiditas pasar sekunder, dan dominasi investor institusional, yang membatasi akses bagi investor ritel. Selain itu, minat terhadap sukuk hijau sering kali terkonsentrasi di segmen tertentu, sehingga tidak cukup mendukung pertumbuhan pasar secara signifikan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah strategis seperti diversifikasi produk sukuk, peningkatan likuiditas pasar, dan promosi yang lebih luas untuk menarik minat dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk investor ritel dan internasional.

4) Kurangnya Standar Internasional Khusus *Green* Sukuk

Kurangnya standar internasional khusus untuk *green* sukuk

menciptakan tantangan dalam hal kredibilitas, transparansi, dan integrasi pasar global. Tanpa pedoman yang seragam, investor mungkin ragu terhadap keabsahan proyek yang didanai dan khawatir terhadap praktik *greenwashing*. Selain itu, perbedaan kriteria antar negara memperumit

evaluasi proyek dan menghambat peluang pembiayaan lintas batas, membatasi potensi *green* sukuk sebagai instrument pembiayaan berkelanjutan di pasar global.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan harmonisasi dengan standar keuangan hijau global, seperti *Green Bond Principle* atau kerangka *Climate Bonds Initiative* yang dapat disesuaikan untuk *green* sukuk. Kolaborasi antara organisasi internasional seperti *Islamic Development Bank* dengan lembaga global juga dapat mempercepat pengembangan standar khusus. Selain itu, peningkatan transparansi melalui mekanisme laporan yang lebih baik dan kampanye kesadaran pasar dapat membantu memperkuat kepercayaan investor dan memperluas adopsi *green* sukuk secara global.

c. Peluang (Opportunities)

1) Dukungan Regulasi Domestik dan Global

Dukungan regulasi domestik dan global menjadi peluang besar bagi pengembangan Green Sukuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan fiskal dan regulasi yang mendukung pembiayaan hijau, seperti penerbitan sukuk hijau untuk mendanai proyek SDGs. Di tingkat global, adanya inisiatif seperti *Paris Agreement* dan standar ESG (*Environmental*,

Social, and Governance) semakin mendorong minat investor terhadap instrumen keuangan berkelanjutan, termasuk *green* sukuk. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional seperti *World Bank* dan *Islamic Development Bank* memberikan landasan bagi pengembangan yang lebih terstruktur. Regulasi yang mendukung ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi *green* sukuk untuk memperluas pangsa pasar, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

2) Peningkatan Permintaan Investasi ESG

Peningkatan permintaan investasi ESG merupakan peluang besar bagi pengembangan *green* sukuk di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, minat investor global terhadap instrumen berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terus meningkat, seiring dengan kesadaran akan pentingnya investasi berkelanjutan. *Green* sukuk, yang menggabungkan prinsip syariah dengan pembiayaan proyek hijau, menawarkan solusi unik yang sesuai dengan preferensi investor ESG. Tren ini juga didukung oleh kebijakan lembaga keuangan global yang mendorong portofolio hijau, sehingga menciptakan pasar yang lebih luas untuk sukuk hijau. Dengan menargetkan segmen investor ESG, *green* sukuk memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak dana, memperluas

dampaknya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan memperkuat posisinya di pasar keuangan internasional.

3) Diversifikasi Proyek Hijau

Diversifikasi proyek hijau menjadi peluang strategis dalam pengembangan Green Sukuk di Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan kebutuhan pembangunan yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk mendanai beragam proyek hijau yang mencakup energi terbarukan, pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Diversifikasi ini tidak hanya memperluas basis penerbitan *green* sukuk, tetapi juga menarik minat lebih banyak investor, baik domestik maupun internasional, yang memiliki preferensi proyek hijau tertentu. Dengan mendanai proyek-proyek yang beragam, *green* sukuk dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian berbagai tujuan SDGs, seperti SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 13 (Aksi Iklim), dan SDG 15 (Kehidupan di Darat), sekaligus memperkuat daya tarik pasar sukuk hijau Indonesia di tingkat global.

4) Kerja Sama dengan Lembaga Global

Kerja sama internasional menjadi peluang penting bagi pengembangan *green* sukuk di Indonesia. Kolaborasi dengan lembaga internasional seperti *World Bank*, *Islamic Development Bank*, dan organisasi lingkungan global memberikan akses pada pendanaan, pengetahuan, dan teknologi untuk mendukung penerbitan sukuk hijau yang lebih efektif. Selain itu, kemitraan ini membuka peluang untuk memperluas pasar *green* sukuk melalui promosi di kalangan investor global, termasuk mereka yang berfokus pada tujuan ESG. Dengan dukungan internasional, Indonesia dapat memperkuat kapasitas teknis, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, dan mengintegrasikan standar internasional yang relevan sehingga memperkuat kredibilitas dan daya saing *green* sukuk sebagai instrumen keuangan hijau di pasar global.

b. Tantangan (*Threats*)

1) Risiko Pasar Global (Ketidakstabilan Ekonomi Global)

Risiko Pasar Global menjadi ancaman yang signifikan bagi pengembangan *green* sukuk di Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi global, seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan suku bunga internasional, dan gejolak geopolitik, dapat

memengaruhi minat investor terhadap instrumen keuangan, termasuk *green* sukuk. Selain itu, persaingan dengan instrumen investasi hijau lainnya, seperti obligasi hijau (*green bonds*), dapat membatasi daya tarik *green* sukuk, terutama jika tidak ada diferensiasi yang jelas. Kondisi ini diperparah oleh kemungkinan penurunan likuiditas di pasar global, yang dapat memperlambat aliran investasi ke pasar sukuk hijau. Oleh karena itu, mitigasi risiko pasar global menjadi penting melalui diversifikasi produk, peningkatan kredibilitas, dan penyesuaian kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya saing *green* sukuk di tengah dinamika global.

2) Ketidakpastian Kebijakan Domestik

Ketidakpastian politik domestik dapat menjadi kelemahan signifikan dalam implementasi *green sukuk* di Indonesia, terutama karena kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan sering kali bergantung pada stabilitas dan prioritas pemerintah yang berkuasa. Pergantian kepemimpinan, perubahan fokus politik, atau konflik antara pemerintah pusat dan daerah dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam regulasi dan dukungan terhadap proyek hijau. Selain itu, risiko ketidakstabilan politik juga dapat mengurangi kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, terhadap komitmen jangka panjang

pemerintah dalam mendanai inisiatif berkelanjutan melalui *green sukuk*. Stabilitas politik yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sering kali terhambat oleh tantangan birokrasi dan dinamika politik yang kompleks.

3) Greenwashing

Greenwashing menjadi kelemahan yang signifikan dalam implementasi *green sukuk*, terutama jika penerbit atau pihak terkait tidak sepenuhnya transparan mengenai dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai. Risiko ini muncul ketika proyek yang diklaim berkelanjutan ternyata tidak memberikan manfaat lingkungan yang substansial atau malah memiliki dampak negatif tersembunyi. Hal ini dapat merusak kepercayaan investor dan masyarakat terhadap *green sukuk* sebagai instrumen keuangan yang bertanggung jawab. Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat dan independen dalam memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan keberlanjutan semakin memperbesar potensi greenwashing, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan pasar keuangan hijau di Indonesia.

4) Tantangan Teknologi Hijau

Tantangan teknologi hijau menjadi kelemahan dalam implementasi *green sukuk* di Indonesia karena adopsi

teknologi ramah lingkungan sering kali menghadapi kendala seperti biaya tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, dan keterbatasan akses terhadap teknologi mutakhir. Banyak proyek hijau, seperti energi terbarukan atau pengelolaan limbah, memerlukan teknologi canggih yang belum sepenuhnya tersedia atau dapat diakses secara lokal. Selain itu, minimnya tenaga kerja terampil dan penelitian di bidang teknologi hijau semakin memperumit penerapan proyek berkelanjutan. Keterbatasan ini dapat mengurangi daya tarik *green sukuk* bagi investor yang mencari solusi berkelanjutan dengan dampak tinggi, sekaligus menghambat pengembangan ekonomi hijau secara keseluruhan di Indonesia

2. Perhitungan Bobot SWOT

Implementasi analisis SWOT untuk menentukan strategi yang dapat memaksimalkan potensi *green sukuk* dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Green sukuk* telah menjadi instrument keuangan yang vital dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. *Green sukuk* memiliki peran strategis untuk mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam aspek pembangunan pembangunan infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan mitigasi perubahan iklim. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan strategi yang tepat berdasarkan analisis SWOT agar *Green Sukuk* dapat berkembang secara

maksimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi. Analisis dilakukan dengan matriks SWOT untuk mengembangkan strategi dari kombinasi faktor internal *strengths* dan *weaknesses* dan eksternal *opportunities* dan *threats*. Adapun perhitungan bobot ditentukan dengan penentuan sebagai berikut:

- a. Bobot mengacu pada pentingnya faktor;
- b. Bobot akhir adalah perkalian dari bobot dan rating.

a. **Kekuatan (*Strengths*)**

Tabel 4. 6
Perhitungan *Strengths* (Kekuatan)

No.	Faktor	Bobot	Rating	Nilai Akhir
1	Komitmen Pemerintah terhadap SDGs	3	4	12
2	Instrumen Keuangan Syariah	3	4	12
3	Dukungan Global terhadap ESG	2	3	6
4	Stabilitas Ekonomi Relatif Tinggi	2	3	6
<i>Total Strengths</i>		10		36

Sumber: Data diolah, 2024

b. **Kelemahan (*Weaknesses*)**

Tabel 4. 7
Perhitungan *Weaknesses* (Kelemahan)

No.	Faktor	Bobot	Rating	Nilai Akhir
1	Kompleksitas Struktur Green	4	3	12

	Sukuk			
2	Rendahnya Literasi Keuangan	3	4	12
3	Pasar Sukuk yang Belum Optimal	2	3	6
4	Kurangnya Standar Khusus	1	3	3
Total Strengths		10		33

Sumber: Data diolah, 2024

c. Peluang (*Opportunities*)

Tabel 4. 8
Perhitungan *Opportunities* (Peluang)

No.	Faktor	Bobot	Rating	Nilai Akhir
1	Peningkatan Minat Investor ESG	3	4	12
2	Diversifikasi Proyek Hijau	3	3	9
3	Dukungan Kebijakan dan Regulasi	2	4	8
4	Kerja Sama dengan Lembaga Global	2	3	6
Total Strengths		10		35

Sumber: Data diolah, 2024

d. Tantangan (*Threats*)

Tabel 4. 9
Perhitungan *Threats* (Ancaman)

No.	Faktor	Bobot	Rating	Nilai Akhir
1	Ketidakstabilan Ekonomi Global	3	3	9
2	Ketidakpastian Kebijakan	3	3	9

	Domestik			
3	Greenwashing	2	3	6
4	Tantangan Teknologi Hijau	2	3	6
Total Strengths		10		30

Sumber: Data diolah, 2024

e. Rekapitulasi dan Analisis Matriks

1) Internal (Strengths vs Weaknesses)

Bobot akhir *strengths* (36) > *weaknesses* (33) yang mengartikan kekuatan *green* sukuk lebih besar daripada kelemahannya, terutama dalam hal dukungan pemerintah dan penerimaan pasar global.

2) Eksternal (Opportunities vs Threats)

Bobot akhir *strengths* (35) > *weaknesses* (30) yang mengartikan peluang eksternal lebih besar seperti minat investor ESG dan dukungan kebijakan yang memberikan keunggulan.

3) Strategi Matriks SWOT (Strengths-Threats)

Tabel 4. 10
Matriks SWOT

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTHS – S</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen terhadap SDGs 2. Instrumen keuangan syariah yang dapat diterima luas 3. Kepercayaan investor global 4. Stabilitas ekonomi relatif tinggi 	<p style="text-align: center;">WEAKNESSES – W</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleksitas streuktur sukuk 2. Rendahnya literasi keuangan 3. Pasar sukuk yang masih terbatas 4. Kurangnya standar internasional khusus green sukuk
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES – O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan regulasi domestic dan global 2. Peningkatan permintaan investasi environmental, social, governance (ESG) 3. Diversifikasi proyek hijau 4. Kerjasama internasional 	<p style="text-align: center;">SO</p> <p>Memanfaatkan dukungan global untuk mendanai proyek hijau melalui diversifikasi instrument keuangan.</p>	<p style="text-align: center;">WO</p> <p>Meningkatkan literasi keuangan dan memperkuat standar green sukuk untuk menarik investor domestik</p>
<p style="text-align: center;">THREATS - T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko pasar global 2. Ketidakpastian politik domestik 3. Greenwashing 4. Tantangan teknologi hijau 	<p style="text-align: center;">ST</p> <p>Menjaga reputasi green sukuk melalui transparansi dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat.</p>	<p style="text-align: center;">WT</p> <p>Mengurangi kompleksitas struktur green sukuk melalui inovasi teknologi seperti blockchain.</p>

Sumber: Data diolah, 2024

Dari matriks SWOT pada table 4.2 dihasilkan empat sel yang dapat diambil kesimpulan yaitu:

a) Strategi SO (Strengths-Opportunities)

Strategi *Strengths-Opportunities* ini menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan segala peluang yang ada dengan memanfaatkan dukungan global untuk mendanai proyek hijau melalui diversifikasi instrumen keuangan.

b) Strategi WO (Weaknesses-Opportunities)

Strategi ini diterapkan untuk pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang dimiliki adalah meningkatkan literasi keuangan dan memperkuat standar *green* sukuk untuk menarik investor domestik.

c) Strategi ST (Strengths-Threats)

ST (*Strengths-Threats*) menggunakan kekuatan mengatasi ancaman yang ada dengan menjaga reputasi *green* sukuk melalui transparansi dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat.

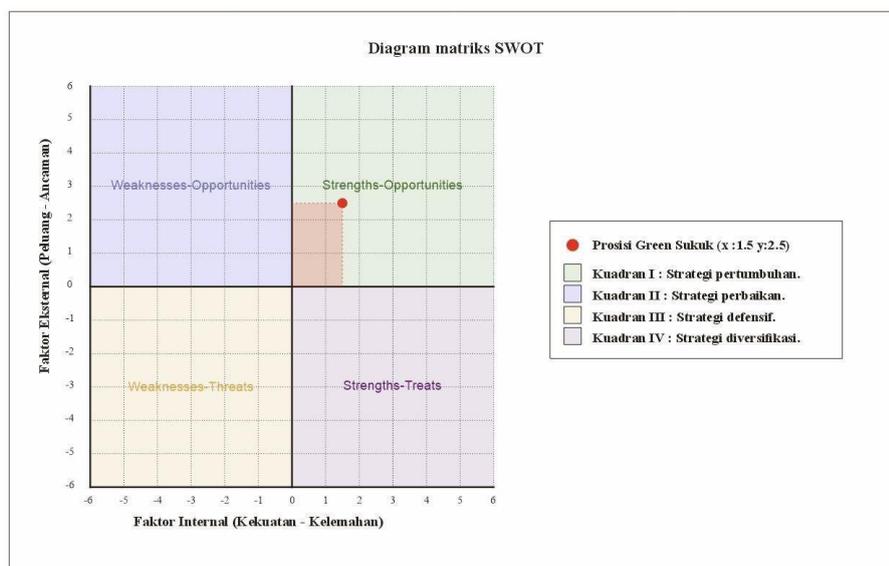
d) Strategi WT (Weaknesses-Threats)

WT (*weaknesses-threats*) digunakan untuk meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman yang

ada dengan mengurangi kompleksitas struktur *green* sukuk melalui inovasi teknologi seperti *blockchain*.

3. Kurva Analisis SWOT

Gambar 4.5
Kuadran Analisis SWOT



Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan diagram matriks SWOT untuk *green* sukuk didapatkan titik yang menunjukkan posisi strategis *green* sukuk pada koordinat (1.5, 2.5), di dalam Kuadran I yaitu Strategi Pertumbuhan (*Growth Strategy*) maka dihasilkan interpretasi strategi yang diperoleh berdasarkan posisi kuadran I dengan fokus strategi sebagai berikut:

- Memanfaatkan kekuatan internal seperti dukungan pemerintah, penerimaan syariah, dan stabilitas ekonomi untuk memperluas penerbitan *green* sukuk;
- Memanfaatkan peluang eksternal seperti peningkatan investor ESG dan

diversifikasi proyek hijau.

Selain dari fokus strategi diperoleh hasil berupa tindakan rekomendasi yaitu sebagai berikut:

a. Ekspansi Pasar

- 1) Edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan partisipasi investor domestik. Langkah ini melibatkan penyelenggaraan program pendidikan yang terstruktur tentang konsep pembiayaan hijau, manfaat investasi dalam *green* sukuk, serta keterkaitannya dengan upaya pencapaian SDGs. Selain itu, kampanye publik melalui media massa, seminar, dan lokakarya dapat digunakan untuk memperkenalkan *green* sukuk kepada calon investor dari berbagai latar belakang, termasuk individu, institusi, dan komunitas bisnis. Penyediaan informasi yang mudah dipahami, seperti panduan investasi dan simulasi keuntungan, juga dapat membantu mengatasi keraguan dan mendorong kepercayaan publik terhadap instrumen ini. Dengan memperkuat kesadaran dan pemahaman masyarakat, potensi pasar domestik untuk *green* sukuk dapat lebih dimaksimalkan, sekaligus menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Menargetkan lebih banyak proyek berbasis SDGs untuk menarik investor internasional. Menargetkan lebih banyak proyek berbasis SDGs merupakan strategi kunci untuk menarik perhatian investor

internasional yang semakin memprioritaskan investasi berkelanjutan. *Green* sukuk dapat difokuskan pada pembiayaan proyek-proyek dengan dampak langsung terhadap tujuan global, seperti pembangunan infrastruktur energi terbarukan, konservasi sumber daya air, dan perlindungan ekosistem laut dan darat. Untuk meningkatkan daya tarik, penting untuk memastikan proyek-proyek tersebut memiliki indikator keberhasilan yang terukur, transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan, dan kepatuhan terhadap standar internasional seperti Prinsip Obligasi Hijau (*Green Bond Principles*). Selain itu, kolaborasi dengan lembaga global seperti Bank Dunia atau UNEP dapat meningkatkan kredibilitas dan visibilitas *green* sukuk di pasar internasional. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat memperluas basis investor global sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam pembiayaan berkelanjutan.

b. Inovasi Produk

- 1) Menyederhanakan struktur *green* sukuk untuk mengurangi kompleksitas. Menyederhanakan struktur *green* sukuk merupakan langkah strategis untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan aksesibilitas bagi berbagai kalangan investor. Upaya ini dapat mencakup penyederhanaan dokumen penawaran, pengurangan persyaratan teknis yang tidak esensial, dan penerapan proses penerbitan yang lebih efisien tanpa mengorbankan kepatuhan

terhadap prinsip syariah. Misalnya, desain produk dapat lebih difokuskan pada bentuk yang mudah dipahami, seperti pembiayaan proyek langsung dengan risiko dan imbal hasil yang jelas. Selain itu, penyediaan platform digital untuk mempermudah pembelian dan manajemen *green* sukuk juga dapat menjadi solusi inovatif. Dengan struktur yang lebih sederhana, *green* sukuk menjadi lebih menarik bagi investor ritel dan institusi yang sebelumnya enggan berpartisipasi karena rumitnya mekanisme, sekaligus mendorong pertumbuhan pasar keuangan hijau secara lebih luas.

- 2) Mengadopsi teknologi *blockchain* untuk transparansi dan efisiensi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam setiap tahap penerbitan dan pengelolaan instrumen ini. Teknologi *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang aman, tidak dapat diubah, dan dapat diakses secara *real-time* oleh semua pemangku kepentingan, termasuk investor, penerbit, dan regulator. Dengan ini, investor dapat dengan mudah memantau alokasi dana dan dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap *green* sukuk. Selain itu, *blockchain* dapat menyederhanakan proses administratif, seperti verifikasi kepatuhan syariah, pelaporan dampak, dan pembayaran dividen, dengan otomatisasi melalui *smart contracts*. Implementasi teknologi ini juga berpotensi mengurangi biaya operasional dan memperluas jangkauan pasar, sehingga *green* sukuk menjadi lebih kompetitif dan

menarik di tingkat domestik maupun internasional.

c. Kemitraan Strategis

- 1) Kerja sama dengan lembaga internasional untuk mendukung pembiayaan proyek hijau seperti lembaga internasional merupakan langkah strategis untuk mendukung pembiayaan proyek hijau melalui *green* sukuk. Kemitraan dengan organisasi seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), atau *United Nations Development Programme* (UNDP) dapat memberikan dukungan teknis, pendanaan, dan akses ke jaringan global. Lembaga-lembaga ini sering memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengidentifikasi, merancang, dan mengelola proyek berkelanjutan yang sesuai dengan standar internasional. Selain itu, kolaborasi ini dapat meningkatkan kredibilitas *green* sukuk Indonesia di mata investor global, karena adanya jaminan kualitas dari lembaga yang diakui secara internasional. Melalui kemitraan strategis ini, Indonesia juga dapat mengakses bantuan teknis untuk inovasi produk dan penguatan kapasitas, serta membuka peluang pembiayaan bersama (*co-financing*) untuk proyek-proyek yang lebih besar dan berdampak signifikan terhadap pencapaian SDGs.

2) Menyediakan insentif khusus bagi proyek yang mendukung SDGs adalah langkah penting untuk mendorong lebih banyak partisipasi dalam penerbitan dan pendanaan melalui *green* sukuk. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak, subsidi bunga, atau akses prioritas ke pembiayaan bagi proyek-proyek yang secara langsung mendukung tujuan keberlanjutan seperti energi terbarukan, konservasi lingkungan, atau pengelolaan limbah. Pemerintah juga dapat memberikan pengakuan atau sertifikasi khusus untuk proyek yang berkontribusi signifikan terhadap SDGs, sehingga meningkatkan reputasi proyek tersebut di mata investor. Dengan insentif ini, lebih banyak pengembang proyek akan termotivasi untuk merancang inisiatif yang selaras dengan SDGs, sekaligus mendorong aliran modal hijau ke sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Strategi ini juga memperkuat peran Green Sukuk sebagai katalis utama dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.

Matriks ini membantu memvisualisasikan arah strategis yang harus diambil Green Sukuk, menunjukkan prioritas pada pertumbuhan dan pengembangan berkelanjutan. Green Sukuk berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung ekonomi berkelanjutan melalui pembiayaan proyek-proyek yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Matriks analisis SWOT yang disusun berfungsi sebagai alat visualisasi untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

yang memengaruhi implementasi Green Sukuk di Indonesia. Berdasarkan matriks ini, tindakan rekomendasi dapat diarahkan untuk memaksimalkan kekuatan seperti dukungan kebijakan pemerintah dan potensi pasar yang besar, sembari mengatasi kelemahan seperti kurangnya kesadaran publik dan keterbatasan kapasitas teknis. Dengan memanfaatkan peluang seperti meningkatnya minat investor global pada pembiayaan hijau dan penguatan kerja sama internasional, Green Sukuk dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

Selain itu, matriks ini membantu menetapkan prioritas strategis yang berfokus pada proyek berkelanjutan yang berdampak langsung pada SDGs, seperti peningkatan infrastruktur air bersih (SDG 6), pengembangan energi terbarukan (SDG 7), dan perlindungan ekosistem darat serta laut (SDG 14 dan 15). Rekomendasi ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, penguatan regulasi, serta inovasi pembiayaan untuk mempercepat implementasi. Dengan arah strategis yang jelas, *green* sukuk dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta memastikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.